



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 82
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali dalam rangka memenuhi anggaran penanggulangan *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* serta usulan pergeseran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

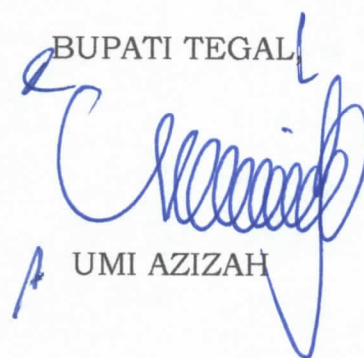
2. Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 6 Agustus 2021


BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 51

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.771.456.723.000,00	2.719.684.965.000,00	(51.771.758.000,00)	(1,87)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	433.822.920.000,00	433.822.920.000,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	133.050.000.000,00	133.050.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.097.000.000,00	3.097.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	51.500.000.000,00	51.500.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.500.000.000,00	51.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	44.500.000.000,00	44.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	44.500.000.000,00	44.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	23.583.855.210,00	23.583.855.210,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.376.054.800,00	9.392.054.800,00	16.000.000,00	0,17	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.944.300.000,00	2.944.300.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	664.500.000,00	664.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.544.842.800,00	3.544.842.800,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.616.040.000,00	1.616.040.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	340.072.000,00	340.072.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.325.313.410,00	12.309.313.410,00	(16.000.000,00)	(0,13)	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.687.223.410,00	6.671.223.410,00	(16.000.000,00)	(0,24)	
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	125.453.000,00	125.453.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	919.560.000,00	919.560.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.005.000,00	40.005.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.394.000.000,00	4.394.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	49.072.000,00	49.072.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.882.487.000,00	1.882.487.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.856.237.000,00	1.856.237.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.470.000.000,00	13.470.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.470.000.000,00	13.470.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.170.000.000,00	11.170.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.719.064.790,00	263.719.064.790,00	0,00	0,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	138.201.290,00	138.201.290,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	102.201.290,00	102.201.290,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	245.065.863.500,00	245.065.863.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	245.065.863.500,00	245.065.863.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.185.804.003.000,00	2.134.032.245.000,00	(51.771.758.000,00)	(2,37)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.984.603.809.000,00	1.932.832.051.000,00	(51.771.758.000,00)	(2,61)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.606.407.225.000,00	1.554.635.467.000,00	(51.771.758.000,00)	(3,22)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	30.110.971.000,00	30.110.971.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.112.675.840.000,00	1.077.039.778.000,00	(35.636.062.000,00)	(3,20)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	170.410.515.000,00	155.693.681.000,00	(14.716.834.000,00)	(8,64)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	293.209.899.000,00	291.791.037.000,00	(1.418.862.000,00)	(0,48)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.200.194.000,00	201.200.194.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000,00	181.202.194.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.202.194.000,00	181.202.194.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.998.000.000,00	19.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.998.000.000,00	19.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.829.800.000,00	151.829.800.000,00	0,00	0,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000,00	145.329.800.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	145.329.800.000,00	145.329.800.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	145.329.800.000,00	145.329.800.000,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	2.894.606.723.000,00	2.868.635.815.000,00	(25.970.908.000,00)	(0,90)	
5.1	BELANJA OPERASI	1.909.075.538.700,00	1.969.415.625.300,00	60.340.086.600,00	3,16	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.154.730.222.767,00	1.156.792.720.222,00	2.062.497.455,00	0,18	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	694.819.887.150,00	693.987.925.975,00	(831.961.175,00)	(0,12)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	515.204.396.530,00	514.200.913.565,00	(1.003.482.965,00)	(0,19)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	47.814.339.498,00	47.755.405.512,00	(58.933.986,00)	(0,12)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.577.475.000,00	7.797.100.000,00	219.625.000,00	2,90	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.284.490.000,00	36.326.490.000,00	42.000.000,00	0,12	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.190.575.000,00	8.227.819.750,00	37.244.750,00	0,45	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.074.488.040,00	26.013.053.140,00	(61.434.900,00)	(0,24)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.183.205.969,00	13.189.938.736,00	6.732.767,00	0,05	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.539.680,00	14.536.958,00	(2.722,00)	(0,02)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.373.567.384,00	35.545.778.132,00	172.210.748,00	0,49	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.435.127.729,00	1.372.947.776,00	(62.179.953,00)	(4,33)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.667.682.320,00	3.543.942.406,00	(123.739.914,00)	(3,37)	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.310.000.000,00	108.310.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	242.570.982.852,00	242.042.970.002,00	(528.012.850,00)	(0,22)	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.652.500.000,00	6.652.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	929.701.852,00	930.602.102,00	900.250,00	0,10	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	220.602.142.000,00	220.602.142.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.070.008.000,00	3.070.008.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	899.999.000,00	899.999.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.187.092.000,00	8.668.018.900,00	(519.073.100,00)	(5,65)	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.229.540.000,00	1.219.700.000,00	(9.840.000,00)	(0,80)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.517.518.000,00	31.517.518.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	113.832.600,00	(42.163.800,00)	(27,03)	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	192.000.000,00	132.818.280,00	(59.181.720,00)	(30,82)	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	357.726.600,00	147.621.600,00	(210.105.000,00)	(58,73)	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66.781.300,00	550.442,00	(66.230.858,00)	(99,18)	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.417.018.000,00	9.193.786.992,00	(1.223.231.008,00)	(11,74)	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.000.000.000,00	7.600.912.386,00	1.600.912.386,00	26,68	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.550.700,00	477.550.700,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	280.364.998,00	280.364.998,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.678.000,00	54.678.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.710.720,00	4.710.720,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.300.000,00	105.297.000,00	(3.000,00)	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.590.220,00	6.590.220,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.726.468,00	2.726.468,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.862.124,00	5.862.124,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.867,00	121.867,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.601,00	365.601,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	100.009.998,00	100.009.998,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.120.000,00	1.053.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	42.225.254.680,00	42.225.254.680,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	42.225.254.680,00	42.225.254.680,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.953.095.087,00	37.375.566.567,00	3.422.471.480,00	10,08	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.953.095.087,00	37.375.566.567,00	3.422.471.480,00	10,08	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.445.620.933,00	741.905.087.328,00	66.459.466.395,00	9,84	
5.1.02.01	Belanja Barang	99.321.941.545,00	113.426.008.550,00	14.104.067.005,00	14,20	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	99.320.181.545,00	113.426.008.550,00	14.105.827.005,00	14,20	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa	230.808.093.250,00	284.760.884.281,00	53.952.791.031,00	23,38	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	170.643.716.050,00	224.487.385.381,00	53.843.669.331,00	31,55	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.157.175.000,00	31.771.672.000,00	(385.503.000,00)	(1,20)	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.838.607.800,00	5.601.180.000,00	(237.427.800,00)	(4,07)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.080.948.800,00	1.399.268.800,00	318.320.000,00	29,45	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.218.000,00	57.368.000,00	27.150.000,00	89,85	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	233.300.000,00	101.050.000,00	(132.250.000,00)	(56,69)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.023.543.300,00	3.966.568.800,00	(1.056.974.500,00)	(21,04)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.770.828.800,00	2.200.864.300,00	430.035.500,00	24,28	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	21.175.000,00	11.300.000,00	(9.875.000,00)	(46,64)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.006.000.500,00	15.164.227.000,00	1.158.226.500,00	8,27	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.142.742.500,00	32.784.949.675,00	(357.792.825,00)	(1,08)	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	38.000.000,00	35.000.000,00	(3.000.000,00)	(7,89)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.546.145.800,00	7.528.174.450,00	(17.971.350,00)	(0,24)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.790.767.120,00	5.975.705.645,00	184.938.525,00	3,19	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.703.929.600,00	19.212.169.600,00	(491.760.000,00)	(2,50)	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	63.899.980,00	33.899.980,00	(30.000.000,00)	(46,95)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	32.926.243.605,00	34.588.076.269,00	1.661.832.664,00	5,05	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.926.243.605,00	34.588.076.269,00	1.661.832.664,00	5,05	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.468.650.000,00	3.989.690.000,00	521.040.000,00	15,02	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.468.650.000,00	3.577.490.000,00	108.840.000,00	3,14	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	412.200.000,00	412.200.000,00	0,00	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.418.330.120,00	78.418.330.120,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.418.330.120,00	78.418.330.120,00	0,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	197.359.619.913,00	193.937.148.433,00	(3.422.471.480,00)	(1,73)	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	197.359.619.913,00	193.937.148.433,00	(3.422.471.480,00)	(1,73)	
5.1.05	Belanja Hibah	75.121.695.000,00	65.100.817.750,00	(10.020.877.250,00)	(13,34)	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	23.937.645.000,00	18.604.767.750,00	(5.332.877.250,00)	(22,28)	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	23.937.645.000,00	18.604.767.750,00	(5.332.877.250,00)	(22,28)	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.976.400.000,00	45.288.400.000,00	(4.688.000.000,00)	(9,38)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	48.926.400.000,00	44.238.400.000,00	(4.688.000.000,00)	(9,58)	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.650.000,00	1.207.650.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.650.000,00	1.207.650.000,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.778.000.000,00	5.617.000.000,00	1.839.000.000,00	48,68	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.148.000.000,00	3.987.000.000,00	1.839.000.000,00	85,61	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.148.000.000,00	3.987.000.000,00	1.839.000.000,00	85,61	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2	BELANJA MODAL	471.865.524.300,00	386.824.526.700,00	(85.040.997.600,00)	(18,02)	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.700.000.000,00	1.511.000.000,00	(7.189.000.000,00)	(82,63)	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.700.000.000,00	1.511.000.000,00	(7.189.000.000,00)	(82,63)	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	8.200.000.000,00	761.000.000,00	(7.439.000.000,00)	(90,72)	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	500.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00	50,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.394.630.100,00	92.985.426.750,00	4.590.796.650,00	5,19	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	98.000.000,00	178.595.000,00	80.595.000,00	82,24	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	98.000.000,00	178.595.000,00	80.595.000,00	82,24	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.538.373.000,00	5.248.174.000,00	709.801.000,00	15,64	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.538.373.000,00	5.225.974.000,00	687.601.000,00	15,15	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	461.696.000,00	421.696.000,00	(40.000.000,00)	(8,66)	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	454.696.000,00	414.696.000,00	(40.000.000,00)	(8,80)	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	157.591.000,00	46.292.500,00	(111.298.500,00)	(70,62)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	157.591.000,00	46.292.500,00	(111.298.500,00)	(70,62)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.601.063.600,00	11.925.081.699,00	1.324.018.099,00	12,49	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.777.486.200,00	4.514.688.700,00	(262.797.500,00)	(5,50)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.628.727.400,00	7.353.972.999,00	1.725.245.599,00	30,65	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	194.850.000,00	56.420.000,00	(138.430.000,00)	(71,04)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.538.133.751,00	4.574.436.951,00	36.303.200,00	0,80	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.503.123.751,00	4.542.936.951,00	39.813.200,00	0,88	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	35.010.000,00	31.500.000,00	(3.510.000,00)	(10,03)	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	42.280.373.000,00	43.136.150.200,00	855.777.200,00	2,02	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	32.175.134.000,00	35.962.629.750,00	3.787.495.750,00	11,77	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.105.239.000,00	7.173.520.450,00	(2.931.718.550,00)	(29,01)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	9.302.781.000,00	6.263.008.000,00	(3.039.773.000,00)	(32,68)	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.449.869.000,00	4.453.951.000,00	2.004.082.000,00	81,80	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.658.412.000,00	1.609.057.000,00	(5.049.355.000,00)	(75,83)	
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	194.500.000,00	194.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.877.438.749,00	19.652.812.400,00	4.775.373.651,00	32,10	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.885.892.699,00	18.641.870.350,00	4.755.977.651,00	34,25	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	991.546.050,00	1.010.942.050,00	19.396.000,00	1,96	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	74.430.000,00	74.430.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	74.430.000,00	74.430.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.367.500.000,00	1.367.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.367.500.000,00	1.367.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.005.562.600,00	151.136.278.650,00	(62.869.283.950,00)	(29,38)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	184.064.270.600,00	120.939.789.150,00	(63.124.481.450,00)	(34,29)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	184.064.270.600,00	120.939.789.150,00	(63.124.481.450,00)	(34,29)	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	303.000.000,00	303.520.000,00	520.000,00	0,17	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	303.000.000,00	303.520.000,00	520.000,00	0,17	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.488.292.000,00	1.548.969.500,00	60.677.500,00	4,08	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.488.292.000,00	1.548.969.500,00	60.677.500,00	4,08	
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	28.150.000.000,00	28.344.000.000,00	194.000.000,00	0,69	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	28.150.000.000,00	28.344.000.000,00	194.000.000,00	0,69	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.957.481.600,00	134.722.992.100,00	(25.234.489.500,00)	(15,78)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	125.938.787.600,00	102.494.562.100,00	(23.444.225.500,00)	(18,62)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	119.255.287.600,00	96.952.062.100,00	(22.303.225.500,00)	(18,70)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.683.500.000,00	5.542.500.000,00	(1.141.000.000,00)	(17,07)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.507.285.000,00	8.839.575.000,00	332.290.000,00	3,91	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.785.980.000,00	4.735.980.000,00	(50.000.000,00)	(1,04)	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.393.297.000,00	1.393.297.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	219.640.000,00	319.640.000,00	100.000.000,00	45,53	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.613.368.000,00	1.895.658.000,00	282.290.000,00	17,50	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.286.021.000,00	7.075.967.000,00	(1.210.054.000,00)	(14,60)	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.250.000.000,00	1.392.850.000,00	142.850.000,00	11,43	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.243.320.000,00	2.100.000.000,00	(143.320.000,00)	(6,39)	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.322.919.000,00	113.335.000,00	(1.209.584.000,00)	(91,43)	
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	969.782.000,00	969.782.000,00	0,00	0,00	


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.225.388.000,00	16.312.888.000,00	(912.500.000,00)	(5,30)	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	17.225.388.000,00	16.312.888.000,00	(912.500.000,00)	(5,30)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	807.850.000,00	6.468.829.200,00	5.660.979.200,00	700,75	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	215.970.000,00	5.886.949.200,00	5.670.979.200,00	2.625,82	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	215.970.000,00	5.886.949.200,00	5.670.979.200,00	2.625,82	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	391.880.000,00	581.880.000,00	190.000.000,00	48,48	
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	391.880.000,00	581.880.000,00	190.000.000,00	48,48	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	18.010.003.000,00	8.010.003.000,00	80,10	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	18.010.003.000,00	8.010.003.000,00	80,10	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	18.010.003.000,00	8.010.003.000,00	80,10	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	18.010.003.000,00	8.010.003.000,00	80,10	
5.4	BELANJA TRANSFER	503.665.660.000,00	494.385.660.000,00	(9.280.000.000,00)	(1,84)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	488.665.660.000,00	479.385.660.000,00	(9.280.000.000,00)	(1,90)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	488.665.660.000,00	479.385.660.000,00	(9.280.000.000,00)	(1,90)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	472.530.660.000,00	472.530.660.000,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	16.135.000.000,00	6.855.000.000,00	(9.280.000.000,00)	(57,51)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.150.000.000,00)	(148.950.850.000,00)	(25.800.850.000,00)	20,95	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.150.000.000,00	155.950.850.000,00	25.800.850.000,00	19,82	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.150.000.000,00	155.950.850.000,00	25.800.850.000,00	19,82	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	5.800.850.000,00	5.800.850.000,00	0,00	
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	5.800.850.000,00	5.800.850.000,00	0,00	
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	103.000.000.000,00	123.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19,42	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	103.000.000.000,00	123.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19,42	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.04.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	123.150.000.000,00	148.950.850.000,00	25.800.850.000,00	20,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Slawi, 6 Agustus 2021

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan
Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4	PENDAPATAN DAERAH	85.161.600.000,00	85.161.600.000,00	0,00	0.00	<i>Lokasi : Kabupaten Tegal</i>
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.161.600.000,00	85.161.600.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.2	Retribusi Daerah	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0.00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5	BELANJA DAERAH	260.137.316.000,00	332.599.474.000,00	72.462.158.000,00	27.86	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan	260.137.316.000,00	332.599.474.000,00	72.462.158.000,00	27.86	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.421.884.460,00	174.715.832.633,00	5.293.948.173,00	3.12	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	180.093.000,00	420.093.000,00	240.000.000,00	133.26	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	180.093.000,00	420.093.000,00	240.000.000,00	133.26	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	180.093.000,00	340.093.000,00	160.000.000,00	88.84	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	21.737.000,00	14.537.000,00	201.90	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.200.000,00	21.737.000,00	14.537.000,00	201.90	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	7.200.000,00	21.737.000,00	14.537.000,00	201.90	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.893.000,00	318.356.000,00	145.463.000,00	84.13	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Barang	40.923.000,00	36.778.000,00	(4.145.000,00)	-10.13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03.01 . 5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	185.080.000,00	185.080.000,00	0.00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03.01 . 5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	28.410.000,00	96.060.000,00	67.650.000,00	238.12	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05.2.03.01 . 5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.410.000,00	96.060.000,00	67.650.000,00	238.12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(174.975.716.000,00)	(247.437.874.000,00)	(72.462.158.000,00)	41.41	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5 . 02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
 Organisasi : 5 . 02 . 5-02.0-00.0-00.04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4	PENDAPATAN DAERAH	2.370.345.004.290,00	2.318.573.246.290,00	(51.771.758.000,00)	-2.18	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.711.201.290,00	32.711.201.290,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.2	Retribusi Daerah	639.000.000,00	639.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	639.000.000,00	639.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	639.000.000,00	639.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.470.000.000,00	13.470.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.470.000.000,00	13.470.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.3.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.170.000.000,00	11.170.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.3.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18.602.201.290,00	18.602.201.290,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	102.201.290,00	102.201.290,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	102.201.290,00	102.201.290,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.07	Pendapatan Bunga	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.1.4.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.185.804.003.000,00	2.134.032.245.000,00	(51.771.758.000,00)	-2.37	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.984.603.809.000,00	1.932.832.051.000,00	(51.771.758.000,00)	-2.61	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.606.407.225.000,00	1.554.635.467.000,00	(51.771.758.000,00)	-3.22	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.150.000.000,00	155.950.850.000,00		19.82	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	5.800.850.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	5.800.850.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	103.000.000.000,00	123.000.000.000,00		19.42	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	103.000.000.000,00	123.000.000.000,00		19.42	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.1.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.5.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.1.5.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		0.00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.04 . xx.x.xx.xx . 6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	123.150.000.000,00	148.950.850.000,00	25.800.850.000,00	20.95	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2021

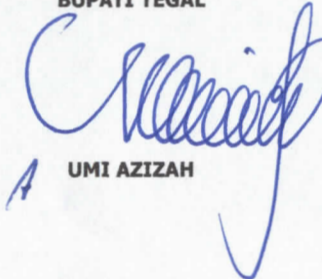
Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Kedungbanteng
Sub Unit Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.08.01 Kecamatan Kedungbanteng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5	BELANJA DAERAH	1.361.979.000,00	1.624.501.000,00	262.522.000,00	19.28	<i>Lokasi : Kabupaten Tegal</i>
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	1.361.979.000,00	1.624.501.000,00	262.522.000,00	19.28	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.152.398.000,00	1.467.395.000,00	314.997.000,00	27.33	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25.328.000,00	25.328.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	11.121.000,00	11.121.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.121.000,00	11.121.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.1	Belanja Pegawai	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.361.000,00	8.361.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Barang	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.02.5.1.2.01	Belanja Barang	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0.00	<i>Lokasi : Kabupaten Tegal</i>
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1.2.01	Belanja Barang	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06.2.01.03 . 5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.361.979.000,00)	(1.624.501.000,00)	(262.522.000,00)	19.28	

Slawi, 6 Agustus 2021

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH